
POLITIK EKSTRA-PARLEMENTER DIGITAL DAN KETAHANAN NASIONAL: MEDIA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN ADVOKASI REPUBLIK MALUKU SELATAN (RMS)

Frans Tory Damara Pradipta^a, Aliyah^b, Gilang Ramadhan^c, Khalid Vikriadi^d,
Irvan Ansyari^e

^{a b c d e}Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
E-mail: franstory24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai instrumen advokasi oleh jaringan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam konteks politik ekstra-parlementer digital serta implikasinya terhadap dinamika komunikasi politik dan ketahanan nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terbatasnya kajian yang mengkaji bagaimana aktor non-negara seperti RMS memanfaatkan ruang digital untuk mempertahankan eksistensi dan menyebarkan narasi politik secara transnasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana terhadap konten komunikasi digital pada akun Instagram @pemerintahrms, @onzestrijd_rms, dan @demoteampemerintahrms, dengan fokus pada narasi, simbol, dan strategi komunikasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi politik alternatif untuk menyebarkan identitas politik, membangun solidaritas diaspora, serta menjaga visibilitas gerakan di ruang publik digital melalui strategi simbolik dan visual yang bersifat transnasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi arena politik ekstra-parlementer digital yang memungkinkan aktor non-negara mempertahankan pengaruhnya di luar mekanisme formal. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus platform dan jumlah akun yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada berbagai platform digital serta menggunakan pendekatan komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Politik Ekstra-Parlementer Digital, Media Sosial, Advokasi RMS, Mobilisasi Digital, Diaspora Politik

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of social media as an advocacy instrument by the Republic of South Moluccas (RMS) network within the context of digital extra-parliamentary politics and its implications for political communication and national resilience. The background of this research is based on the limited studies examining how non-state actors such as RMS utilize digital spaces to sustain their existence and disseminate political narratives transnationally. This research employs a qualitative approach using discourse analysis of digital communication content on Instagram accounts @pemerintahrms, @onzestrijd_rms, and @demoteampemerintahrms, focusing on narratives, symbols, and communication strategies. The findings indicate that social media functions as an alternative political communication space to disseminate political identity, build diaspora solidarity, and maintain the movement's visibility in the digital public sphere through symbolic and visual strategies that are transnational in nature. The study concludes that social media has become a digital extra-parliamentary political arena that enables non-state actors to sustain their influence beyond formal political mechanisms. However, this study is limited by its focus on specific platforms and a small number of accounts. Therefore, future research is recommended to expand the scope to multiple digital platforms and apply comparative approaches to gain a more comprehensive understanding.

Keywords: Digital Extra-Parliamentary Politics, Social Media, RMS Advocacy, Digital Mobilization, Political Diaspora

* Corresponding Author.

E-mail: franstory24@gmail.com

PENDAHULUAN

Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan salah satu gerakan separatis yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik pascakemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan pada tahun 1950 dalam situasi politik nasional yang masih mengalami konsolidasi negara pascakolonial. Meskipun keberadaan teritorial RMS berakhir setelah operasi militer pemerintah Indonesia pada awal dekade 1960-an, gagasan politik dan identitas gerakan tersebut tidak sepenuhnya hilang. Narasi RMS tetap bertahan melalui jaringan diaspora Maluku, terutama di Belanda yang terus mereproduksi memori historis serta identitas politik gerakan dalam ruang sosial dan politik transnasional. Studi mengenai RMS menunjukkan bahwa isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan konflik sejarah, tetapi juga stigma sosial, identitas politik, dan dinamika demokrasi lokal yang terus berkembang hingga masa kontemporer (Fretes, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa narasi RMS terus beririsan dengan konstruksi identitas budaya dan politik masyarakat Maluku dalam konteks sosial yang lebih luas (Herman & Fretes, 2024).

Dalam perkembangan kajian akademik, RMS umumnya dianalisis dalam kerangka konflik identitas dan dinamika politik lokal. Kajian sebelumnya menyoroti bagaimana isu RMS muncul dalam konflik sosial dan membentuk persepsi masyarakat terhadap stabilitas politik di Maluku (Herman & Fretes, 2016). Namun, perubahan lanskap komunikasi global menunjukkan bahwa keberlanjutan gerakan politik tidak lagi hanya bergantung pada ruang fisik atau struktur organisasi formal, melainkan juga pada kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi digital. Transformasi ini menandai pergeseran penting dalam praktik komunikasi politik modern, di mana media sosial menjadi medium utama dalam produksi, distribusi, dan legitimasi narasi politik.

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dan partisipasi publik secara signifikan. Media digital memungkinkan aktor politik maupun kelompok non-negara membangun jaringan komunikasi yang lebih luas, cepat, dan terdesentralisasi. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini politik serta arena interaksi ideologis yang dapat memperkuat polarisasi maupun solidaritas politik. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam mobilisasi politik dan pembentukan ruang diskursus publik digital (Shaholli, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakat melalui interaksi digital yang partisipatif (Kurniawan et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun dukungan publik secara luas (Aisyah & Sutan, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial mampu memengaruhi opini publik dan dinamika demokrasi digital (Zayyin, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial mendorong transformasi komunikasi politik melalui perubahan pola interaksi antara aktor politik dan masyarakat (Arsyad et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mobilisasi politik kontemporer. Platform digital memungkinkan terbentuknya aksi kolektif melalui jaringan komunikasi horizontal yang tidak bergantung pada organisasi formal. Studi lain menunjukkan bahwa aktivitas advokasi politik di media sosial memiliki dampak nyata terhadap dinamika mobilisasi sosial serta pembentukan solidaritas politik digital. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu membangun simpati publik dan keterlibatan politik masyarakat secara luas (Rosana et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai alat kampanye politik modern yang efektif (Jayus et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa platform digital seperti TikTok berperan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda (Rizanul et al., 2025).

Di Indonesia, perkembangan media sosial turut memengaruhi pola komunikasi politik dan partisipasi masyarakat. Media sosial menjadi medium penting dalam penyebaran informasi politik, pembentukan pengetahuan politik masyarakat, serta mobilisasi opini publik. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah digunakan sebagai alat kampanye politik dalam konteks pemilu digital (Lestari et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi dalam membangun citra politik serta strategi komunikasi aktor politik (Idris, 2024). Fenomena

tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena penting dalam praktik komunikasi politik kontemporer.

Dalam konteks gerakan sosial digital, media sosial memungkinkan penyebaran narasi politik lintas batas negara serta memperluas jangkauan advokasi politik secara global. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu membentuk jaringan komunikasi politik yang bersifat transnasional serta memperkuat solidaritas kolektif. Selain itu, media digital juga berfungsi sebagai ruang reproduksi gerakan sosial yang memungkinkan penyebaran simbol, identitas kolektif, dan pesan advokasi secara berkelanjutan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena politik alternatif yang melampaui mekanisme politik konvensional.

Transformasi komunikasi digital tersebut juga berkaitan dengan munculnya politik ekstra-parlementer di ruang digital. Media sosial memungkinkan berbagai kelompok politik menyampaikan aspirasi di luar jalur institusi formal melalui kampanye digital, advokasi simbolik, dan mobilisasi opini publik. Perubahan ini memperlihatkan bahwa ancaman maupun dinamika politik tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang institusional, tetapi juga dalam kompetisi narasi di ruang informasi digital.

Meskipun kajian mengenai media sosial dan mobilisasi politik digital telah berkembang pesat, penelitian yang secara khusus mengkaji advokasi RMS dalam kerangka politik ekstra-parlementer digital masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek historis konflik RMS atau dinamika identitas lokal, sementara analisis mengenai strategi komunikasi digital RMS di media sosial belum banyak dikaji secara sistematis. Padahal, keberadaan akun media sosial seperti *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms* dan *@demoteampemerintahrms* menunjukkan adanya transformasi strategi advokasi politik yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana produksi narasi identitas dan mobilisasi dukungan internasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis praktik advokasi RMS sebagai bentuk politik ekstra-parlementer digital yang beroperasi melalui media sosial. Penelitian ini tidak hanya melihat RMS sebagai fenomena historis atau konflik identitas, tetapi sebagai aktor komunikasi politik digital yang memanfaatkan platform media sosial untuk mempertahankan eksistensi narasi politiknya dalam ruang publik global. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana media sosial digunakan sebagai instrumen advokasi politik RMS, bagaimana narasi identitas politik direproduksi dalam ruang digital, serta bagaimana praktik komunikasi tersebut merepresentasikan bentuk politik ekstra-parlementer digital yang memiliki implikasi terhadap dinamika komunikasi politik dan ketahanan nasional di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai instrumen advokasi politik RMS dalam ruang politik ekstra-parlementer digital. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi narasi politik serta strategi komunikasi yang disebarkan melalui media sosial.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi politik pada platform Instagram, khususnya pada akun *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms* yang secara aktif mempublikasikan konten terkait narasi politik, identitas gerakan, serta kampanye advokasi RMS. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan dengan kajian politik digital, gerakan separatis, dan ketahanan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital dan dokumentasi terhadap unggahan media sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif untuk mengidentifikasi tema narasi, pola komunikasi politik, serta strategi advokasi yang digunakan dalam konten media sosial RMS.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana media sosial digunakan sebagai instrumen advokasi politik serta implikasinya terhadap dinamika ketahanan nasional di era komunikasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Advokasi Digital RMS di Media Sosial

Perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang komunikasi politik baru yang memungkinkan kelompok non-negara menyampaikan aspirasi politik serta membangun jaringan solidaritas secara transnasional. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mobilisasi politik dan produksi narasi identitas kolektif di ruang publik digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa praktik advokasi politik kontemporer semakin bergeser ke ruang digital yang bersifat terbuka, partisipatif, dan lintas batas negara (Barberá, 2020). Media sosial memungkinkan aktor politik menyampaikan pesan secara langsung kepada audiens tanpa melalui institusi politik formal, sehingga memperluas peluang mobilisasi politik digital (Hasan & Paul, 2025).

Dalam konteks gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), praktik advokasi digital dapat diamati melalui aktivitas beberapa akun Instagram yang secara konsisten memproduksi konten politik, yaitu *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms*. Ketiga akun tersebut digunakan sebagai medium komunikasi politik untuk mempertahankan eksistensi simbolik RMS sekaligus membangun visibilitas isu di ruang publik internasional (Organisasi Pemerintah, 2026). Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai ruang produksi wacana politik yang memungkinkan penyebaran identitas kolektif serta penguatan solidaritas diaspora (Hayat et al., 2021). Berdasarkan observasi terhadap unggahan pada akun *@pemerintahrms*, ditemukan bahwa konten yang dipublikasikan didominasi oleh narasi identitas politik, peringatan sejarah RMS, serta pesan solidaritas kepada komunitas internasional. Pada saat penelitian dilakukan, akun ini memiliki jumlah pengikut yang menunjukkan keberadaan audiens digital yang relatif stabil. Salah satu unggahan yang menampilkan simbol bendera RMS dan pesan advokasi politik memperoleh interaksi berupa jumlah tanda suka dan komentar yang menunjukkan adanya respons audiens terhadap narasi yang disampaikan. Tingkat interaksi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai medium pembentukan keterlibatan politik digital melalui respons simbolik pengguna (Chairun Nisa Zempi et al., 2023).

Gambar 1. Akun Instagram *@pemerintahrms* sebagai media komunikasi advokasi RMS



Gambar 2. Postingan advokasi “Prabowo in Den Haag Protestactie” pada akun *@pemerintahrms*



Sumber: Akun Instagram *@pemerintahrms*

Akun *@onzestrijd_rms* menampilkan karakter komunikasi visual yang lebih kuat melalui penggunaan simbol perjuangan, slogan politik, serta dokumentasi aktivitas komunitas diaspora RMS. Pada akun ini, jumlah pengikut yang relatif besar dibandingkan akun lain menunjukkan adanya strategi komunikasi berbasis visual storytelling yang bertujuan memperluas jangkauan audiens digital. Beberapa unggahan yang menampilkan aksi demonstrasi diaspora memperoleh jumlah suka dan komentar yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa konten visual memiliki kemampuan mobilisasi perhatian publik di ruang digital. Fenomena tersebut sejalan dengan konsep affective publics, yaitu terbentuknya keterlibatan politik melalui ekspresi emosional dan narasi visual di media sosial (Papacharissi, 2016).

Gambar 3. Akun Instagram *@onzestrijd_rms* sebagai penyebaran narasi advokasi RMS



Gambar 4. Postingan advokasi pada akun *@onzestrijd_rms*



Sumber: Akun Instagram *@onzestrijd_rms*

Sementara itu, akun *@demoteampemerintahrms* lebih berfokus pada dokumentasi kegiatan demonstrasi dan aktivitas advokasi diaspora RMS di berbagai negara, khususnya di Belanda. Unggahan pada akun ini menampilkan foto aksi massa, penggunaan atribut politik RMS, serta pesan dukungan terhadap gerakan tersebut. Jumlah suka dan komentar pada unggahan demonstrasi menunjukkan pola interaksi yang memperlihatkan dukungan simbolik sekaligus reproduksi solidaritas digital di antara pengguna media sosial. Aktivitas tersebut menggambarkan bagaimana media sosial dapat memperkuat aksi kolektif melalui jaringan komunikasi digital yang terdesentralisasi (Bennett & Segerberg, 2018).

Selain itu, pola distribusi konten pada akun *@demoteampemerintahrms* menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun visibilitas gerakan melalui momentum tertentu, seperti peringatan sejarah RMS maupun aksi demonstrasi serentak di berbagai lokasi. Peningkatan intensitas unggahan pada momen tersebut mengindikasikan bahwa waktu menjadi elemen strategis dalam praktik komunikasi digital yang dilakukan. Media sosial dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan perhatian publik serta memperluas jangkauan eksposur gerakan di ruang digital.

Di sisi lain, penggunaan visual berupa dokumentasi aksi massa dan simbol-simbol politik RMS turut memperkuat konstruksi identitas kolektif diaspora. Representasi visual tersebut berperan dalam membangun framing mengenai keberlanjutan dan luasnya dukungan terhadap

gerakan di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi visual memiliki posisi strategis dalam memengaruhi persepsi audiens serta membangun legitimasi simbolik. Akun *@demoteampemerintahrms* tidak hanya merepresentasikan aktivitas advokasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk makna dan memperkuat narasi gerakan melalui praktik komunikasi visual yang berulang.

Gambar 5. Akun Instagram *@demoteampemerintahrms* sebagai media advokasi diaspora RMS



Gambar 6. Postingan advokasi demonstrasi diaspora RMS pada akun *@demoteampemerintahrms*



Sumber: Akun Instagram *@demoteampemerintahrms*

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ketiga akun Instagram tersebut, terlihat bahwa masing-masing akun memiliki fokus strategi komunikasi yang berbeda dalam praktik advokasi digital RMS. Akun *@pemerintahrms* lebih menekankan pada pembentukan identitas politik dan penyampaian narasi historis, sedangkan akun *@onzestrijd_rms* menggunakan pendekatan visual untuk membangun keterlibatan emosional audiens. Sementara itu, akun *@demoteampemerintahrms* berperan sebagai media dokumentasi aksi kolektif diaspora yang menampilkan aktivitas demonstrasi dan mobilisasi dukungan di ruang publik internasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa advokasi digital RMS dijalankan melalui pembagian peran komunikasi yang saling melengkapi dalam ekosistem media sosial.

Analisis terhadap interaksi pengguna pada ketiga akun menunjukkan bahwa praktik advokasi RMS tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan keterlibatan politik digital melalui mekanisme respons audiens seperti tanda suka dan komentar. Pada unggahan demonstrasi yang ditampilkan pada Gambar 2, Gambar 4, dan Gambar 6, jumlah tanda suka dan komentar yang relatif tinggi menunjukkan adanya perhatian publik digital terhadap narasi advokasi yang disampaikan. Tingkat interaksi tersebut menjadi indikator penting dalam memahami bagaimana narasi advokasi diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh komunitas digital. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang politik ekstra-parlementer yang memungkinkan mobilisasi dukungan tanpa keterlibatan langsung dalam institusi formal negara (Kharel, 2024).

Temuan ini memperlihatkan bahwa advokasi RMS di media sosial merupakan bentuk adaptasi strategi politik dalam era komunikasi digital. Melalui produksi konten visual, narasi historis, dan

dokumentasi aksi diaspora, media sosial digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan identitas politik sekaligus membangun legitimasi simbolik di ruang publik global. Praktik advokasi digital RMS menunjukkan bagaimana gerakan politik berbasis identitas dapat bertahan melalui transformasi teknologi komunikasi serta dinamika partisipasi politik digital kontemporer (Utomo, 2024).

B. Narasi Identitas Politik RMS di Media Sosial

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang penting dalam pembentukan dan reproduksi identitas politik suatu gerakan. Dalam konteks gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), platform digital dimanfaatkan untuk mempertahankan identitas kolektif serta menyampaikan narasi sejarah perjuangan kepada publik yang lebih luas. Praktik komunikasi politik tersebut dapat diamati melalui berbagai unggahan yang dipublikasikan pada akun Instagram *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms*.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap konten yang dipublikasikan, berbagai unggahan pada akun-akun tersebut menunjukkan penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan identitas politik RMS. Simbol yang ditampilkan meliputi penggunaan bendera RMS, lambang gerakan, serta berbagai representasi visual yang menegaskan atribut perjuangan RMS. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, tetapi juga memiliki makna politis sebagai representasi identitas kolektif yang dipertahankan di ruang digital (Onzestrijd, 2025).

Selain penggunaan simbol, sejumlah unggahan menampilkan dokumentasi kegiatan komunitas diaspora Maluku yang menunjukkan dukungan terhadap narasi politik RMS. Dokumentasi tersebut mencakup aktivitas komunitas, aksi solidaritas, serta kegiatan sosial yang melibatkan pendukung RMS di luar wilayah Indonesia, khususnya di Belanda. Publikasi aktivitas diaspora tersebut memperlihatkan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana membangun jaringan komunikasi transnasional sekaligus memperkuat solidaritas di antara para pendukung gerakan.

Unggahan lain juga menampilkan peringatan sejarah RMS, termasuk momentum historis yang berkaitan dengan perjalanan politik gerakan tersebut. Konten yang berorientasi pada memori sejarah menunjukkan adanya upaya mempertahankan memori kolektif sebagai bagian dari strategi keberlanjutan gerakan. Dalam kajian gerakan sosial, memori kolektif berperan dalam menjaga kontinuitas identitas politik serta memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota komunitas pendukung.

Penggunaan simbol, narasi sejarah, serta dokumentasi kegiatan diaspora yang dipublikasikan melalui media sosial memperlihatkan bahwa platform digital dimanfaatkan sebagai ruang reproduksi identitas politik RMS. Identitas gerakan tidak hanya dipertahankan dalam lingkup internal komunitas, tetapi juga dikomunikasikan kepada audiens yang lebih luas melalui jaringan komunikasi digital global.

Dalam perspektif gerakan sosial, pembentukan identitas kolektif merupakan elemen penting yang memungkinkan suatu gerakan mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Identitas kolektif dibangun melalui simbol bersama, narasi historis, serta praktik komunikasi yang memperkuat solidaritas kelompok (Chairun Nisa Zempi & Kuswanti, 2023). Media sosial memperluas proses tersebut dengan menyediakan ruang distribusi narasi yang bersifat terbuka dan berkelanjutan.

Karakter komunikasi media sosial yang terbuka juga memungkinkan penyebaran pesan politik kepada audiens yang lebih luas dibandingkan media komunikasi konvensional. Kondisi ini memberikan peluang bagi kelompok advokasi non-negara untuk mempertahankan visibilitas politik melalui produksi konten digital secara berkelanjutan. Media sosial kemudian berfungsi sebagai ruang komunikasi alternatif yang memungkinkan artikulasi identitas politik serta pembentukan jaringan dukungan berbasis komunitas digital (Kharel, 2024).

Pengamatan terhadap unggahan pada akun Instagram yang berkaitan dengan RMS menunjukkan bahwa narasi identitas politik gerakan terus direproduksi melalui simbol visual, dokumentasi kegiatan, serta penyampaian memori sejarah di ruang digital. Praktik komunikasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial berperan sebagai medium reproduksi identitas

kolektif sekaligus sarana konsolidasi solidaritas di antara pendukung RMS yang tersebar di berbagai wilayah.

C. Strategi Komunikasi Digital Gerakan RMS

Perkembangan media sosial memberikan peluang baru bagi berbagai kelompok politik untuk menyampaikan pesan serta membangun jaringan komunikasi yang melampaui batas geografis. Dalam konteks gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik untuk menyebarkan narasi perjuangan serta memperluas jangkauan advokasi di ruang digital. Aktivitas komunikasi tersebut dapat diamati melalui berbagai unggahan yang dipublikasikan pada akun Instagram *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms* yang secara konsisten menampilkan pesan politik dalam bentuk konten visual maupun narasi teks.

Salah satu strategi komunikasi digital yang menonjol adalah penggunaan simbol identitas gerakan sebagai elemen utama dalam penyampaian pesan politik. Berbagai unggahan pada akun-akun tersebut menampilkan bendera RMS, lambang gerakan, serta atribut visual yang merepresentasikan identitas politik RMS. Penggunaan simbol ini berfungsi sebagai perangkat komunikasi politik yang memperkuat identifikasi kelompok serta membangun kesadaran kolektif di antara audiens digital. Dalam komunikasi politik digital, simbol visual memiliki peran penting dalam menyederhanakan pesan politik sehingga lebih mudah dikenali dan disebarkan di ruang media sosial (Barberá, 2020).

Strategi komunikasi lainnya terlihat melalui publikasi dokumentasi aktivitas komunitas diaspora yang mendukung gerakan RMS. Unggahan pada akun *@pemerintahrms* dan *@demoteampemerintahrms* sering menampilkan kegiatan komunitas, pertemuan sosial, maupun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung RMS di luar wilayah Indonesia, khususnya di Belanda. Publikasi aktivitas diaspora tersebut menunjukkan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana penghubung komunitas transnasional sekaligus sebagai mekanisme pemeliharaan jaringan komunikasi politik lintas wilayah (Herman & Fretes, 2024).

Selain itu, media sosial dimanfaatkan sebagai medium dokumentasi kegiatan advokasi politik. Akun *@demoteampemerintahrms* secara rutin mempublikasikan kegiatan demonstrasi dan aksi solidaritas yang menampilkan atribut identitas RMS serta pesan politik yang berkaitan dengan tuntutan gerakan. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip aktivitas gerakan, tetapi juga sebagai strategi komunikasi untuk memperluas eksposur politik melalui reproduksi konten di ruang digital. Praktik ini menunjukkan bahwa komunikasi politik digital memungkinkan aktivitas advokasi lokal memperoleh visibilitas yang lebih luas di tingkat global (Utomo, 2024).

Strategi komunikasi digital RMS juga terlihat melalui penyampaian narasi sejarah perjuangan gerakan. Beberapa unggahan pada akun *@pemerintahrms* dan *@onzestrijd_rms* memuat konten yang berkaitan dengan peristiwa historis RMS serta peringatan momentum tertentu yang dianggap penting bagi identitas gerakan. Penyebaran narasi sejarah melalui media sosial memperlihatkan upaya mempertahankan memori kolektif sekaligus membangun legitimasi simbolik di ruang publik digital (Fretes, 2022).

Penggunaan bahasa internasional dalam sejumlah unggahan menunjukkan adanya strategi komunikasi yang ditujukan untuk menjangkau audiens global di luar komunitas internal RMS. Strategi ini memperlihatkan bahwa media sosial digunakan bukan hanya sebagai ruang komunikasi internal, tetapi juga sebagai alat diplomasi simbolik yang bertujuan meningkatkan visibilitas isu yang diangkat kepada publik internasional. Karakter komunikasi digital yang terbuka memungkinkan pesan politik didistribusikan secara cepat serta menjangkau jaringan audiens yang lebih luas (Hasan & Paul, 2025).

Dalam perspektif komunikasi politik digital, praktik tersebut menunjukkan adanya transformasi strategi advokasi politik dari pola komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis jaringan digital. Media sosial memungkinkan kelompok advokasi non-negara menyampaikan aspirasi politik tanpa bergantung pada struktur organisasi formal, sekaligus membangun keterlibatan audiens melalui distribusi konten yang berkelanjutan (Kharel, 2024).

Pengamatan terhadap aktivitas komunikasi pada akun Instagram yang berkaitan dengan RMS memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital dijalankan melalui kombinasi penggunaan simbol identitas, dokumentasi aktivitas diaspora, narasi sejarah, serta produksi konten advokasi visual. Kombinasi strategi tersebut menunjukkan upaya sistematis untuk mempertahankan keberadaan narasi RMS di ruang publik digital serta memperkuat solidaritas di antara para pendukung gerakan.

Media sosial dalam konteks ini berperan sebagai medium strategis yang memungkinkan penyebaran pesan politik secara luas sekaligus menjaga keberlanjutan komunikasi gerakan di era digital. Strategi komunikasi digital yang dijalankan melalui platform Instagram memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi membentuk pola baru dalam praktik advokasi politik kontemporer serta memperluas ruang artikulasi politik di luar institusi formal negara.

D. Media Sosial sebagai Arena Politik Ekstra-Parlementer Digital

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mendorong munculnya bentuk partisipasi politik baru yang tidak selalu berlangsung melalui jalur institusi formal negara. Media sosial menghadirkan ruang komunikasi alternatif yang memungkinkan berbagai aktor politik menyampaikan aspirasi, membangun jaringan dukungan, serta menyebarkan narasi politik kepada audiens yang lebih luas. Transformasi ini menunjukkan bahwa praktik politik kontemporer tidak lagi terbatas pada mekanisme parlementer, melainkan juga berlangsung dalam ruang digital yang bersifat terbuka dan partisipatif (Idris, 2025).

Fenomena tersebut dapat diamati melalui aktivitas komunikasi digital yang dilakukan oleh akun Instagram *@pemerintahrms*, *@onzezijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms* yang berkaitan dengan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Berdasarkan hasil pengamatan terhadap unggahan pada akun-akun tersebut, media sosial dimanfaatkan sebagai medium komunikasi politik untuk menyampaikan pesan advokasi serta mempertahankan keberadaan narasi RMS di ruang publik digital. Konten yang dipublikasikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memuat pesan politik yang diarahkan kepada audiens internasional (Organisasi Pemerintah, 2026).

Berbagai unggahan memperlihatkan dokumentasi kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas diaspora RMS di luar wilayah Indonesia, khususnya di Belanda. Dokumentasi tersebut menampilkan aktivitas aksi publik, penggunaan atribut identitas RMS, serta pesan politik yang berkaitan dengan tuntutan gerakan. Penyebaran dokumentasi aksi melalui media sosial menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai perpanjangan arena politik fisik, di mana aktivitas demonstrasi tidak berhenti pada lokasi aksi, tetapi terus direproduksi melalui distribusi konten digital (RMS, 2025).

Selain dokumentasi demonstrasi, unggahan pada akun-akun tersebut juga memuat pesan solidaritas serta kampanye digital yang menekankan identitas dan perjuangan RMS. Penggunaan simbol seperti bendera, slogan, dan representasi visual lainnya memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan untuk memperkuat pesan advokasi serta membangun keterikatan emosional di antara audiens digital. Praktik ini menunjukkan bahwa komunikasi politik digital berperan dalam membentuk ruang interaksi politik yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan luas (Hayat et al., 2021).

Dalam perspektif politik ekstra-parlementer, aktivitas komunikasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang berlangsung di luar mekanisme kelembagaan negara. Politik ekstra-parlementer merujuk pada aktivitas politik seperti advokasi publik, kampanye digital, serta mobilisasi dukungan yang tidak bergantung pada struktur kekuasaan formal. Media sosial memungkinkan praktik tersebut berlangsung secara berkelanjutan melalui jaringan komunikasi digital yang fleksibel dan tidak terikat batas geografis (Kharel, 2024).

Kehadiran media sosial memberikan peluang bagi kelompok advokasi untuk meningkatkan visibilitas politik tanpa keterlibatan langsung dalam institusi pemerintahan. Karakter komunikasi digital yang terbuka memungkinkan pesan politik menjangkau audiens global serta mempertemukan individu dengan kepentingan politik yang serupa dalam satu ruang komunikasi

bersama. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai arena baru bagi praktik mobilisasi politik kontemporer (Hasan & Paul, 2025).

Aktivitas komunikasi digital RMS menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai medium untuk mempertahankan eksistensi gerakan melalui produksi konten advokasi yang berkelanjutan. Penyebaran dokumentasi kegiatan, simbol identitas, serta narasi politik melalui Instagram memperlihatkan bagaimana gerakan berbasis identitas memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun jaringan dukungan transnasional serta mempertahankan relevansi politik di ruang publik global (Fretes, 2022).

Dalam kajian komunikasi politik digital, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai arena interaksi politik yang memungkinkan terbentuknya solidaritas kolektif di antara pengguna. Interaksi melalui konten digital membuka peluang terbentuknya keterlibatan politik yang tidak bergantung pada struktur organisasi formal, melainkan pada jaringan komunikasi berbasis platform digital (Sulaiman, 2024).

Pengamatan terhadap aktivitas komunikasi pada akun Instagram yang berkaitan dengan RMS memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi arena politik ekstra-parlementer digital yang memungkinkan penyampaian aspirasi politik di luar jalur institusional. Melalui produksi dan reproduksi konten advokasi, ruang digital dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan politik sekaligus membangun jaringan dukungan yang melibatkan komunitas diaspora maupun audiens internasional.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam memperluas ruang partisipasi politik serta mengubah cara gerakan politik mempertahankan eksistensinya di era komunikasi digital. Arena politik tidak lagi terbatas pada ruang institusional, tetapi juga berlangsung dalam ruang digital yang memungkinkan berbagai aktor politik mengekspresikan aspirasi serta membangun mobilisasi dukungan secara berkelanjutan.

E. Potensi Ancaman Advokasi Digital RMS terhadap Negara Indonesia

Perkembangan media sosial telah membuka ruang baru bagi berbagai kelompok politik untuk menyampaikan narasi serta membangun dukungan publik secara lebih luas melalui jaringan komunikasi digital. Dalam konteks gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), ruang digital dimanfaatkan sebagai medium untuk mempertahankan keberadaan narasi politik gerakan melalui berbagai konten yang dipublikasikan di platform Instagram. Aktivitas komunikasi tersebut dapat diamati pada akun *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms* yang secara aktif menyebarkan simbol identitas RMS, dokumentasi kegiatan diaspora, serta pesan advokasi politik yang berkaitan dengan isu RMS (Organisasi Pemerintah, 2026).

Konten yang dipublikasikan menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi internal komunitas, tetapi juga sebagai ruang untuk memperluas jangkauan pesan politik kepada audiens internasional. Beberapa unggahan menampilkan penggunaan simbol identitas seperti bendera RMS, dokumentasi demonstrasi diaspora di luar negeri, serta pesan solidaritas yang ditujukan kepada publik global. Praktik komunikasi tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial memungkinkan aktor non-negara menyampaikan aspirasi politik tanpa melalui mekanisme institusi formal negara (Hayat et al., 2021).

Dalam kajian komunikasi politik digital, media sosial memiliki kemampuan mempercepat distribusi informasi sekaligus memperluas jaringan komunikasi politik lintas wilayah. Karakter komunikasi digital yang terbuka memungkinkan terbentuknya ruang pertukaran narasi politik yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu politik tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilisasi politik tidak lagi terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga berlangsung melalui produksi dan distribusi konten digital secara berkelanjutan (Kharel, 2024).

Dari perspektif ketahanan nasional, aktivitas advokasi digital seperti yang terlihat pada akun-akun yang berkaitan dengan RMS menunjukkan bahwa ruang informasi digital telah menjadi arena kontestasi narasi politik. Narasi yang diproduksi secara berulang melalui media sosial berpotensi membentuk persepsi kolektif mengenai identitas politik maupun sejarah suatu gerakan. Hal ini terlihat pada unggahan yang memuat narasi historis RMS serta dokumentasi aktivitas diaspora yang secara konsisten mereproduksi identitas politik gerakan di ruang digital (Fretes, 2022).

Penelitian mengenai jaringan komunikasi digital menunjukkan bahwa media sosial mampu memperluas mobilisasi politik serta memperkuat solidaritas kolektif dalam suatu gerakan sosial. Penyebaran konten melalui jaringan daring memungkinkan terbentuknya keterhubungan antarpengguna yang melampaui batas geografis sehingga memperkuat keberlanjutan gerakan dalam jangka panjang (Steinert-threlkeld et al., 2015).

Selain itu, kajian mengenai aktivisme digital menunjukkan bahwa platform digital dapat digunakan untuk memperkuat identitas kolektif serta membangun dukungan publik melalui produksi narasi yang berulang dalam ruang komunikasi daring. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi komunikasi berperan dalam mempertahankan eksistensi gerakan sosial melalui reproduksi simbol dan pesan politik secara berkelanjutan (Meisuri, 2024).

Keberadaan jaringan diaspora juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan narasi RMS di ruang digital. Unggahan pada akun *@demoteampemerintahrms* menampilkan dokumentasi demonstrasi dan aksi solidaritas komunitas diaspora RMS di berbagai negara, khususnya di Belanda. Publikasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan untuk menghubungkan komunitas pendukung yang tersebar secara transnasional sekaligus meningkatkan visibilitas gerakan di tingkat global (RMS, 2025).

Perkembangan komunikasi politik digital memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi arena baru dalam pembentukan opini publik serta penyebaran narasi politik. Dinamika politik pada era digital tidak hanya berlangsung dalam ruang politik formal, tetapi juga berkembang melalui interaksi komunikasi yang terjadi di platform digital. Transformasi ini memperlihatkan perubahan pola partisipasi politik yang semakin bergantung pada teknologi komunikasi modern (Idris, 2025).

Dalam konteks negara, fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan terhadap ketahanan nasional tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik, tetapi juga dapat muncul melalui kontestasi narasi politik di ruang digital. Media sosial memungkinkan berbagai kelompok menyampaikan interpretasi politik tertentu secara cepat dan luas, sehingga ruang digital menjadi bagian dari dinamika politik kontemporer yang memperlihatkan bagaimana identitas, sejarah, dan tuntutan politik suatu gerakan terus direproduksi melalui jaringan komunikasi daring.

F. Implikasi Advokasi Digital RMS terhadap Ketahanan Nasional

Interaksi digital yang terbentuk melalui aktivitas unggahan dan respons audiens pada akun-akun terkait RMS memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium penyampaian pesan, tetapi juga sebagai ruang produksi makna politik. Respons pengguna dalam bentuk komentar, tanda suka, maupun penyebaran ulang konten menunjukkan adanya proses komunikasi dua arah yang memungkinkan terbentuknya komunitas digital dengan kesamaan orientasi politik. Pola interaksi ini memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat memperkuat kohesi identitas kelompok melalui mekanisme partisipasi simbolik yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ketahanan nasional, dinamika tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap stabilitas tidak selalu hadir dalam bentuk fisik atau konvensional, melainkan juga dapat muncul melalui konstruksi narasi di ruang digital. Penyebaran pesan politik yang dilakukan secara konsisten berpotensi membangun persepsi tertentu mengenai legitimasi politik suatu gerakan, terutama ketika pesan tersebut diterima oleh audiens lintas negara. Media sosial dalam hal ini menjadi arena kontestasi wacana yang memungkinkan berbagai aktor non-negara berpartisipasi dalam pembentukan opini publik global.

Aktivitas advokasi digital RMS juga memperlihatkan adanya transformasi strategi gerakan politik dari pola mobilisasi tradisional menuju pendekatan berbasis komunikasi jaringan. Dokumentasi kegiatan diaspora yang dipublikasikan secara rutin menunjukkan upaya menjaga kontinuitas identitas politik melalui representasi visual dan narasi historis. Praktik ini memperkuat keberadaan simbolik gerakan di ruang digital sekaligus menjaga keterhubungan antara komunitas diaspora dengan isu politik yang diangkat.

Lebih lanjut, keberadaan media sosial sebagai ruang komunikasi terbuka menyebabkan batas antara ruang domestik dan internasional menjadi semakin kabur. Narasi yang diproduksi dalam satu wilayah dapat dengan mudah diakses oleh audiens global, sehingga isu yang sebelumnya

bersifat lokal dapat memperoleh perhatian yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik digital memiliki implikasi strategis terhadap persepsi internasional serta dinamika keamanan informasi dalam konteks negara modern.

Pengamatan terhadap pola komunikasi pada akun *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms* menunjukkan bahwa praktik advokasi digital dilakukan secara konsisten melalui penggunaan simbol identitas, dokumentasi aktivitas kolektif, serta penyampaian pesan politik yang berulang. Konsistensi tersebut memperlihatkan adanya strategi komunikasi yang bertujuan mempertahankan eksistensi narasi RMS di ruang publik digital sekaligus membangun keterlibatan audiens secara berkelanjutan.

Implikasi utama dari fenomena ini terhadap ketahanan nasional terletak pada pentingnya memahami ruang digital sebagai bagian dari dimensi keamanan non-tradisional. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan fisik, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam merespons dinamika informasi, narasi politik, serta mobilisasi opini publik yang berkembang melalui teknologi komunikasi digital. Oleh karena itu, perkembangan advokasi politik berbasis media sosial menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena strategis dalam dinamika politik kontemporer yang memerlukan perhatian dalam kajian keamanan nasional.

Sebagai penutup, temuan penelitian menunjukkan bahwa advokasi digital RMS melalui media sosial merepresentasikan perubahan pola komunikasi politik dalam era digital yang semakin berbasis jaringan dan partisipasi daring. Aktivitas unggahan, penggunaan simbol identitas, serta dokumentasi kegiatan diaspora memperlihatkan bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk mempertahankan keberlanjutan narasi politik sekaligus membangun keterlibatan audiens secara transnasional. Praktik komunikasi tersebut menegaskan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena strategis dalam produksi dan distribusi wacana politik yang melampaui batas geografis negara. Dalam konteks ketahanan nasional, fenomena ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika komunikasi digital sebagai bagian dari perkembangan politik kontemporer yang memengaruhi pembentukan persepsi publik, mobilisasi dukungan, serta kontestasi narasi di ruang publik global. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan simpulan penelitian mengenai karakter advokasi digital RMS dan implikasinya dalam dinamika komunikasi politik modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai instrumen advokasi politik oleh jaringan yang berkaitan dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam ruang politik ekstra-parlementer digital. Melalui akun Instagram seperti *@pemerintahrms*, *@onzestrijd_rms*, dan *@demoteampemerintahrms*, berbagai konten yang memuat identitas politik, simbol gerakan, memori historis, serta aktivitas diaspora dipublikasikan untuk mempertahankan visibilitas isu RMS di ruang publik digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang memungkinkan penyebaran narasi gerakan secara transnasional sekaligus memperluas jaringan dukungan melalui interaksi komunikasi digital.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika advokasi digital tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi turut membentuk ruang kontestasi narasi politik di ranah digital global. Dalam perspektif ketahanan nasional, praktik advokasi tersebut mencerminkan bentuk tantangan non-militer yang berkembang melalui kompetisi wacana, produksi identitas politik, serta pembentukan opini publik di ruang informasi digital. Dengan demikian, perkembangan komunikasi politik berbasis media sosial menandai perubahan pola aktivitas politik kontemporer yang tidak lagi terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. N., & Sutan, A. J. (2024). Sensor Penyiaran Televisi Indonesia : Mengukur Perubahan Muatan Negatif Dalam Konten Siaran Televisi. *Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 12(1), 32–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/medium.v12i1.15894>

- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., Rantona, S., Komunikasi, P. I., Muhammadiyah, U., & Hamka, P. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik : Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik Dinamika Komunikasi Politik dalam Era Media Sosial : Peran Platform Digital dalam Pembentukan Opini Publik , " mengeksplorasi peran penting yang dimainkan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 240–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1593>
- Barbera, P. (2020). Social media, echo chambers, and political polarization. In *Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform* (pp. 34–35). *Cambridge University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108890960>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2018). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Freelon, D., McIlwain, C. D., & Clark, M. D. (2018). Quantifying the power and consequences of social media protest. *New Media & Society*, 20(3), 990–1011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444816676646>
- Fretes., C. H. J. De. (2022). Stigma Diantara Republik Maluku Selatan (RMS) : Pembangunan dan Demokrasi di Maluku. *Jurnal: KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 31(1), 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24246/kritis.v31i1p39-58>
- Gerbaudo, P. (2017). The mask and the flag: Populism, citizenism, and global protest. In *Oxford University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190491574.001.0001>
- Hadi, H. S., & Hidayat, M. Q. (2025). Integrasi Creative Thinking dalam Kurikulum Berbasis OBE untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(8), 274–281. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1685>
- Harsono, H. (2023). Analisis Model Struktural Pada Generasi Z di Kota Malang. *Jurnal: Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166–187. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.752>
- Hasan, M., & Paul, A. (2025). The Role of Social Media in Political Mobilization. *Business & Social Sciences Review*, 11(5), 403–408. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.25163/business.3110221>
- Hayat, M. A., Jayadigingrat, S., & Wibisono, G. (2021). Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Soaial Teknologi*, 2(1), 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/61>
- Herman, C., & Fretes, C. H. j. De. (2024). Intersection of Cultural Identity , Politics , and RMS Stigma in Moluccas. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 11(5), 403–408. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5741>
- Herman, C., & Fretes, C. H. J. De. (2014). Kemunculan Isu RMS dan Pengaruhnya Dalam Konflik Ambon 1999. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 3(2), 229–248. <https://doi.org/https://doi.org/https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/60>
- Herman, C., & Fretes, C. H. J. De. (2016). Dinamika Isu Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Masyarakat Ambon Dalam Konflik 1999. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 3(1), 45–68. <https://doi.org/https://doi.org/https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/496>
- Idris, K. (2024). Sosial Media dan Pemasaran Politik Politisi Muda: Studi Pemanfaatan Instagram oleh Calon Anggota Legislatif Muda Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2024. *Jurnal Penelitian Politik*, 21(1), 55–72. <https://doi.org/10.14203/jpp.v21i1.1685>
- Jayus, Sumaiyah, Mairita, D., & Abdullah, A. (2024). Media Sosial sebagai Media Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024 Social Media as a Political Campaign Media Ahead of the 2024 Elections. *Jurnal Simbolika*, 10(1), 72–81. <https://doi.org/10.31289/symbolika.v10i1.11468>
- Khamdan, M., & Fata, A. K. (2025). Social Media and Political Mobilization in General Elections

- in Indonesia. *TAPIS: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 211–238. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24042/w6cb0n28>
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social Media 's Influence on Political Participation: Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis in Indonesian Psychology. *Jurnal Psikologi*, 51(3), 336–355. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- Kristianto, Ramadhan, A. B., & Marsetyo, F. D. (2021). Media Sosial dan Connective Action: Studi Kasus Penggunaan Twitter sebagai Ruang Solidaritas selama Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsds.1037>
- Lestari Dewi, V., Ana, & Sri, K. (2024). Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jkn.v6i1.442>
- Meisuri. (2024). Digital Humanities and Cultural Preservation Humaniora Digital dan Pelestarian Budaya. *Social Studies and Humanities Journal (SOSHUM)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.62207/yr5yap50>
- Onzestrijd. (2025). Onze STRIID de nieuwsbron voor Gen-Z. Instagram. https://www.instagram.com/onzestrijd_rms/
- Papacharissi, Z. (2016). Affective publics and structures of storytelling: Sentiment, events and mediality. *Information, Communication & Society*, 19(3), 307–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1109697>
- Pemerintah, O. (2026). Official Instagram of the government of the Republic of the South Moluccas. Instagram. <https://www.instagram.com/pemerintahrms/>
- Pitchan, M. A., Salman, A., & Arib, N. M. (2025). A systematic literature review on online scams: Insights into digital literacy, technological innovations, and victimology. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 41(1), 107–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/JKMJC-2025-4101-07>
- Provision, S. (2023). Social Media as a Tool for Political Mobilization: A Case Study of the 2020 Hong Kong Protests. *Journal of Public Representative and Society*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/Provisionhttps://doi.org/10.55885/jprsp.v3i1.199>
- RMS, P. (2025). demo team pemerintah rms. Instagram. <https://www.instagram.com/demoteampemerintahrms>
- Rizanul, R. C., Egistin, D., Sofiana, S., Jasmine, A., & Juniarto, D. (2025). Analisis Peran Media Sosial (TikTok) dalam Dinamika Partisipasi Politik pada Pemilu Presiden 2024. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.91>
- Rosana, E., Salim, L., Setiawan, A. M., & Massay, E. M. (2025). Public Sympathy As Political Mobilization In The Digital Space Based on Study of Religious Figures on Social Media. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 23(1), 179–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1187>
- Shaholli, M. (2025). Social Media as a Tool for Political Mobilization and Public Debate Marjeta Shaholli. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 12(1), 192–199. <https://doi.org/10.56345/ijrdv12n1s125>
- Simonton, M. (2017). Classical Greek Oligarchy. In Princeton University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9781400885145>
- Steinert-Threlkeld, Z. C., Mocanu, D., Vespignani, A., & Fowler, J. H. (2015). Online social networks and offline protest. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 4(19), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5741>
- Sulaiman, A. (2024). Media Digital dan Gerakan Sosial: Analisis Logika Aksi Konektif Abstrak. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1913–1920. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.829>
- Theocharis, Y., Lowe, W., Deth, J. W. Van, & Garcia-Albacete, G. (2015). Using Twitter to mobilize protest action. *Information, Communication & Society*, 18(2), 202–220.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.948035>
Utomo, B. S. (2024). Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Rencana Penundaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 108–128.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10214>
- Zayyin, A. Q. & Z. Z. (2024). The Role of Social Media in the 2024 Indonesian Election Campaign : Regulatory Challenges and Global Political Influence Zayyin. *Mandala Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 67–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33822/mjihi.v6i2.8299>
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116–123.
<https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>